

# BARUGA

Jurnal Ilmiah



RESPON GURU TERHADAP PERUBAHAN TERHADAP PENGELOMPOKAN DAN LAYANAN PELAYANAN  
DIBALOK DOKLAT KEAGAMAAN WAKAFISARAHON DAN JAWAHSHAH  
*Aliat, Khatir Ahmad, Saizuddin*

DAFTAR KONFERENSI ALUMNI AKSI RAKYAT PADA PERGARAN TINGGI SIBIRI  
STUDI KASUS PROFESIONALISME PROGRAM GURU DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
*Amor*

KESEKUTUAN EVALUASI FORMATIF DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA  
HASIL BELAJAR DAN ANALISIS TERHADAP BEBERAPA HASIL PENELITIAN EVALUASI FORMATIF  
*Firman Baiq*

KESIAHWAJIAN LESSON STUDY DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP PERUBAHAN  
*Jufri*

PROSEDUR MODEL PENDIDIKAN DI INDONESIA, TINJAUAN WITTE DRENTAS GURU PEDAGOGI  
*Salsamawati*

KEDISPUNYAN SEBAGAI INDIKATOR PERTAMA DALAM MENINGKATKAN TINGKAT KINERJA  
*Halimatul Huda*

KOOPERATIF BELAJAR TIPE JERAWA DALAM PENBELAJARAN BIOLOGI  
*Fachri Akhman*

PESAN PENBELAJARAN BAKTERIA SEBAGAI MONSTRATISME DALAM  
PENGEMBANGAN PERANGKAT BELAJAR  
*Amir Hamid*



BALAI DIKLAT KEAGAMAAN WAKAFISARAHON  
Jl. Sultan Alaudin No. 115 Tlp. (0411-871241) Fax. (0411-871241)  
Makassar 90221

ISSN: 1978-2233

***BARUGA***  
**Jurnal Ilmiah**

**JURNAL BARUGA**  
**BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MAKASAR**

---

ISSN: 1978-2233

Volume II Nomor 3/September 2009

**Pengarah**

**Penanggung Jawab :**  
**Pemimpin Redaksi :**  
**Wakil Pemimpin Redaksi :**

**Drs. H. Syamsul Bahri**  
**Drs. Firman Basir, M.Pd.**  
**Musriadi, S.H.**

**Tim Pengelola:**  
**Koordinator Penyunting :**  
**Penyunting Pelaksana :**

**Drs. H. Ahmad Rapi, M.Pd.**  
**Drs. Wanhar, M.Pd.**  
**Drs. Hamzah, M.Ag.**  
**Drs. H. M. Rasyidi Syahid**  
**Dra. Hj. Hafidah As'ad, M.Pd.**  
**Drs. H. Arif Abdullah, M.Pd.**  
**Drs. Ishaq Husain**

**Staf Redaksi :**

**Dra. Hj. Kartini Halim, M.Si.**  
**Musyarrifah Amin, S.Sos, M.Si.**

**Sekretariat/Administrasi :**

**Dra. St. Jumriati. S, M.Si.**  
**Dra. Nelly**  
**Arbain, S.Pd.**  
**Andi Ali Imran Sadik**  
**Amrin Hamid, S.Si.**

**Alamat Redaksi:**  
**Jalan Sultan Alauddin No. 105 Makassar**  
**Telp/Fax: (0411) 873 240, Kode Pos: 90221**  
**E-mail: firkhana@plaza.com**

## PETUNJUK BAGI PENULIS

1. \*Jurnal Ilmiah BARUGA\* ISSN: 1978-2233 (Terbit Maret dan Desember).
2. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi 1,5 Arial font 11 pada kertas Kuarto/A4, panjang 10-15 halaman dan diserahkan paling lambat 2 bulan sebelum penerbitan sebanyak 1 eksemplar (Print Out dan Soft Copy CD).
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan ilmiah tentang kegiatan kediklatan, Pendidikan, dan Pembelajaran dalam bentuk: **Temuan Peneliti, Strategi dan Metode Pembelajaran, Pengamatan Praktis, Kajian Kepustakaan, Gagasan Konseptual.**
4. Semua naskah ditulis dalam bentuk ulasan (esai), disertai judul sub bab (*heading*) masing-masing bagian dengan jenis huruf yang dicetak tebal rata dengan tepi kiri dan bukan dengan angka, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab sebagai berikut:  
Peringkat satu : **HURUF BESAR TEBAL, RATA DENGAN TEPI KIRI.**  
Peringkat kedua : **Huruf Besar Kecil, Tebal Rata dengan Tepi Kiri.**  
Peringkat ketiga : **Huruf Besar Kecil, Tebal, Miring, Rata dengan Tepi Kiri**
5. Setiap naskah disertai: a) abstrak dalam bahasa Inggris/Arab/Indonesia (50-100 kata), b) kata-kata kunci, c) identitas pengarang.
6. Artikel berupa:
  - a. Hasil Penelitian
    - Judul
    - Nama Penulis/Jbfn dan Tpt. Tugas
    - Abstrak
    - Kata-kata Kunci
    - Pendahuluan (l. bkg & kajian teori)
    - Metode Penelitian
    - Metode Penelitian dan Pembahasan
    - Kesimpulan dan Saran
    - Daftar Pustaka
  - b. Non Penelitian
    - Judul
    - Nama Penulis/Jbfn dan Tpt. Tugas
    - Abstrak
    - Kata-kata Kunci
    - Sub Judul (sesuai kebutuhan)
    - Penutup (Kesimpulan dan Saran)
    - Daftar Pustaka
7. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian yang berlaku. (Tidak dengan sistem foot note dan end note).
8. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan EYD yang dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
9. Naskah yang tidak dimuat tidak dikembalikan.
10. Harga Langganan Rp. 25.000,-/Eks kecuali Edisi Khusus, hubungi Redaksi: (0411 - 873240, 081342616422). Penulis diharapkan bertanggung.

## DAFTAR ISI

RESPON GURU MATA PELAJARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT GURU MAPEL DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MANADO, AMBON, DAN MAKASSAR <i>Abd. Kadir Ahmad - Badruzzaman</i> .....	Halaman 167 - 186
DAYA KOMPETITIF ALUMNI MADRASAH PADA PERGURUAN TINGGI UMUM (STUDI KASUS PADA ALUMNI PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA) <i>Anwar</i> .....	Halaman 187 - 202
KEEFEKTIVAN EVALUASI FORMATIF DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA (HASIL KAJIAN METAANALISIS TERHADAP BEBERAPA HASIL PENELITIAN EVALUASI FORMATIF) <i>Firman Basir</i> .....	Halaman 203 - 218
MEMAKSIMALKAN LESSON STUDY DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU MATA PELAJARAN <i>Japar</i> .....	Halaman 219 - 234
FILOSOFI MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA (TINJAUAN KRITIS ORIENTASI BARU PEDAGOGI) <i>Sukmawati</i> .....	Halaman 235 - 244
KEDISIPLINAN SEBAGAI INDIKATOR PERTAMA DALAM MENGUKUR TINGKAT KINERJAPNS <i>Hafidah As'ad</i> .....	Halaman 245 - 254
COOPERATIVE LEARNIG TIPE JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI <i>Fachri Rahman</i> .....	Halaman 255 - 262
PERAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERACUAN KONSTRUKTIVISME DALAM PENGGUNAAN POLA PIKIR INDUKTIF-DEDUKTIF <i>Amrin Hamid</i> .....	Halaman 253 - 272

# FILOSOFI MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

## (Tinjauan Kritis Orientasi Baru Pedagogi)

Sukmawati, S.Pd., M.Pd.<sup>(1)</sup>

### Abstrak

Polemik dan kritik yang diarahkan kepada dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan nasional pada dasarnya dapat dipandang sebagai sarana untuk lebih mendewasakan pendidikan, sehingga melahirkan kekayaan pengalaman utamanya spirit dalam upaya pencarian model penyelenggaraan pendidikan nasional. Akhir dari semua itu adalah harapan bersama untuk menjadikan pendidikan nasional sebagai bagian dari transformasi culture dan sosial Indonesia untuk menuju bangsa yang bermartabat sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci : Filosofi, Mutu, Pendidikan

Isu pendidikan selalu menarik dari waktu ke waktu, karena pendidikan secara esensial mengandung dua hal pokok yaitu: *Pertama*, Pendidikan merupakan hak setiap individu warga negara karenanya pemerintah berkewajiban untuk mengatur terselenggaranya pendidikan dengan baik dan memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan. *Kedua*, Pendidikan terkait erat dengan martabat suatu bangsa, yakni melalui proses pendidikan yang berkualitas akan dapat dicapai sumber daya manusia yang handal, kompetitif dengan bangsa-bangsa lain. Tidak heran apabila hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsanya.

Terkait dengan persoalan mutu tersebut, tidak ada satu pihak pun yang membantah bahwa mutu pendidikan kita sedang sangat terpuruk. Yang menjadi polemik terutama dikalangan pakar pendidikan adalah filosofi mutu pendidikan nasional. Karena meskipun semua kalangan sepakat bahwa mutu pendidikan adalah sebuah keniscayaan namun ada perbedaan pendapat yang mendasar tentang bagaimana memahami serta cara mencapai mutu dimaksud. Secara fenomenologis, implikasi dari perbedaan cara pandang tersebut meng-

---

<sup>(1)</sup> Penulis adalah Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi

## DAFTAR PUSTAKA

- Crosby, P.C. *Quality is free. The art of making quality certain*. New York, Mc.Graw hill, 1979.
- Danim, Sudarwan. *Inovasi Pendidikan*. Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Depdiknas. *Teropong Pendidikan Kita*. Jakarta, Depdiknas, 2007
- Deming, W.E. *Total Quality Management and Deming's 14 points*, <http://www.mifreu.com/edwards-deming.html>
- Don, Adam & Chapman, David. *The Quality of Education. Dimensions and Strategies Asia* Development Bank, 2002.
- Murgatroyd, Stephen & Morgan, Colin. *Total Quality Management and the School*, Buckingham, Open University Press, 1994.
- O'neil, William. *Idiologi-Idiologi Pendidikan*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Winch, Christopher. *Quality and Education*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1998.
- Wen, Sayling. *Future of Education*. Batam: Lucky Publishers, 2003
- [www.compas.com](http://www.compas.com).
- [www.suarapembaharuan.com](http://www.suarapembaharuan.com).

## PENGANTAR REDAKSI

**P**uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya Jurnal Baruga Balai Diklat Keagamaan Makassar Volume II No. 3 September 2009 ini telah hadir kembali di hadapan para pembaca. Dalam edisi ini disajikan tulisan yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian dan gagasan konseptual.

Tulisan untuk terbitan Volume II No. 3 September 2009 ini diawali oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak DR. H. Abd. Kadir Ahmad, MS (Kepala BDK Makassar) dan Drs. Badruzzaman, M.Pd tentang *"Respon Guru Mata Pelajaran Terhadap Penyelenggaraan Diklat Guru Mapel di Balai Diklat Keagamaan Manado, Ambon, dan Makassar"*. Selanjutnya, *"Daya Kompetitif Alumni Madrasah Pada Perguruan Tinggi Umum" (Studi Kasus pada Alumni Program Doktor Universitas Pendidikan Indonesia)* yang diteliti oleh Bapak Prof. DR. H. Anwar, M.Pd.

Selanjutnya Drs. Firman Basir, M.Pd mengemukakan hasil kajian Meta Analisis berupa *"Keefektivan Evaluasi Formatif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa" (Hasil Kajian Meta Analisis terhadap Beberapa Hasil Penelitian Evaluasi Formatif)*. Berikutnya, tulisan Drs. M. Japar, M.Pd. tentang *"Memaksimalkan Lesson Study Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Mata Pelajaran"*. Selanjutnya, Sukmawati, S.Pd, M.Pd. dalam tulisannya mengulas tentang *"Filosofi Mutu Pendidikan Di Indonesia" (Tinjauan Kritis Orientasi Baru Pedagogi)*. Dra. Hj. Hafidah As'ad, M.Pd. tentang *"Kedisiplinan Sebagai Indikator Pertama Dalam Mengukur Tingkat Kinerja PNS"*. Selanjutnya, tulisan Fachri Rahman, S.Sos tentang *"Kooperatif Learning Tipe Jigsaw Dalam Pembelajaran Biologi"*, dan diakhiri dengan tulisan tentang *"Peran Pembelajaran Matematika Beracuan Konstruktivisme Dalam Penggunaan Pola Pikir Induktif-Deduktif"* oleh Amrin Hamid, S.Pd.

Apresiasi khusus kami terhadap para penyunting ahli yang tidak henti-hentinya memberikan kritikan dan saran terhadap penyempurnaan Jurnal Baruga Balai Diklat keagamaan Makassar.

Akhirnya, kami dari redaksi Jurnal Baruga Balai Diklat Keagamaan Makassar mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam terbitan ini terdapat hal yang tidak berkenan di hati para pembaca dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak sehingga Jurnal Baruga ini dapat kami terbitkan.

Makassar, 2009

Redaksi

## DAFTAR ISI

RESPON GURU MATA PELAJARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT GURU MAPEL DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MANADO, AMBON, DAN MAKASSAR <i>Abd. Kadir Ahmad - Badruzzaman</i> .....	Halaman 167 - 186
DAYA KOMPETITIF ALUMNI MADRASAH PADA PERGURUAN TINGGI UMUM (STUDI KASUS PADAALUMNI PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA) <i>Anwar</i> .....	Halaman 187 - 202
KEEFEKTIVAN EVALUASI FORMATIF DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA (HASIL KAJIAN METAANALISIS TERHADAP BEBERAPA HASIL PENELITIAN EVALUASI FORMATIF) <i>Firman Basir</i> .....	Halaman 203 - 218
MEMAKSIMALKAN <i>LESSON STUDY</i> DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU MATA PELAJARAN <i>Japar</i> .....	Halaman 219 - 234
FILOSOFI MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA (TINJAUAN KRITIS ORIENTASI BARU PEDAGOGI) <i>Sukmawati</i> .....	Halaman 235 - 244
KEDISIPLINAN SEBAGAI INDIKATOR PERTAMA DALAM MENGUKUR TINGKAT KINERJA PNS <i>Hafidah As'ad</i> .....	Halaman 245 - 254
COOPERATIVE LEARNIG TIPE JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI <i>Fachri Rahman</i> .....	Halaman 255 - 262
PERAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERACUAN KONSTRUKTIVISME DALAM PENGGUNAAN POLA PIKIR INDUKTIF-DEDUKTIF <i>Amrin Hamid</i> .....	Halaman 253 - 272

implikasikan pembatasan yang panjang tentang ideologi yang mendasari praktik pendidikan hingga tingkat pembelajaran di sekolah.

Dalam pengantarnya, Onis (2005:12) menegaskan bahwa apa hakikat pendidikan dan mendidik tergantung dari kacamata ideologi mana yang dipergunakan. Dalam praktiknya, tanpa disadari pendidikan formal tengah mengalami transisi dari model pendidikan yang sama sekali tidak menghiraukan perubahan masyarakat sekelilingnya, menuju model pendidikan pembangunan, dimana pendidikan harus diabdikan untuk memperkuat pembangunan tanpa dipersekolahkan apa hakikat ideologi yang menjadi dasar dari pembangunan itu sendiri. Fenomena munculnya sekolah unggulan, gagasan tentang *link and match* dalam aspek pendidikan merupakan indikator menguatnya model pendidikan pembangunan tersebut. Namun model pendidikan seperti itu mendapatkan kritik yang tajam dari kelompok penganut ideologi kritis. Hasil analisis politik ekonomi terhadap pendidikan yang dilakukan oleh Samuel Bowel sebagaimana dikutip Onis (2005:11) mengungkap bahwa pendidikan dengan model pembangunan tersebut cenderung merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme belaka. Menurutny, pandangan yang demikian itu yang melahirkan aliran reproduksi dalam pendidikan yang tentu saja bertentangan dengan kelompok kritis semisal Freire, dimana pendidikan penyadaran kritis justru akan memproduksi resistensi dan kritik terhadap proses dehumanisasi akibat kapitalisme.

Pandangan yang lain terkait dengan hal diatas, diungkap oleh Wen (2003:83) bahwa diantara banyak teori tentang pendidikan, ada dua teori yang selalu bertentangan. *Aliran Memanfaatkan Pendidikan* menekankan bahwa apapun yang dipelajari seseorang di sekolahnya harus bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Jadi, pendidikan harus praktis; yang dipelajari harus diterapkan dengan baik. *Aliran Mengembangkan Potensi* melihat sasaran pendidikan sebagai mengembangkan potensi manusia sepenuhnya, terlepas dari nilainya bagi masyarakat di masa depan. Namun ditegaskan Wen bahwa kedua teori tersebut sesungguhnya menggunakan asumsi yang sama, kita tidak mungkin mencapai dua hal sekaligus, kita tidak mungkin mempelajari sesuatu yang bermanfaat praktis sekaligus mengembangkan potensi kita. Menurutny, keterbatasan yang terbesar dalam pendidikan sekarang ini adalah kurikulumnya. Siswa tidak memiliki pilihan kecuali harus mempelajari semua pelajaran yang sudah ditetapkan entah mereka menyukainya atau tidak. Artinya ada anak yang dipaksakan untuk melakukan apa yang jelas-jelas bukan bidangnya (Wen:2003).

Fenomena yang digambarkan di atas jelas tergambar dalam dinamika pendidikan nasional. Seperti yang diungkap Surakhmad bahwa kacaunya dunia pendidikan nasional disebabkan oleh tidak adanya landasan falsafah yang mendasari praksis pendidikan di lapangan. Landasan falsafah pendidikan, katanya, adalah visi bersama yang mampu mempertemukan berbagai pemikiran tentang praksis pendidikan nasional. Kealpaan falsafah ini, menurutny, telah mendedukai pembincangan tentang masalah pendidikan yang terjebak pada

persoalan bersifat teknis metodologis. Dia juga menilai, kesalahan terbesar pemerintah dalam hal pengembangan pendidikan adalah terlalu kuatnya intervensi politis, sehingga dunia pendidikan bergantung pada kepentingan politik kelompok penguasa ([www.suara.pembaharuan.com](http://www.suara.pembaharuan.com)).

Berbeda dengan Surakhmad, Sudijarto justru meyakini bahwa Pancasila dan juga Pembukaan UUD 1945 telah dengan jelas mengungkap falsafah pendidikan nasional. Beliau menegaskan bahwa dengan memahami makna kehidupan bangsa yang cerdas dan maju kebudayaan nasionalnya, selanjutnya akan dapat dijawab pertanyaan "wujud terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang merata, relevan, dan bermutu" (Soedijarto, 2008: 13). Lebih jelas beliau menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2003 mempertegas komitmen pemerintah untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu. Namun Yumarna ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)) menilai bahwa UU No. 20 Tahun 2003 kurang memiliki visi futuristik kedepan dan hanya berfokus pada kebutuhan dan tuntutan temporal zaman sekarang. Lebih ditegaskan lagi bahwa filosofi pendidikan yang ada pada Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU dimaksud terkonsentrasi pada aktivitas guru, dosen atau pendidik padahal filosofi pendidikan yang demikian itu justru akan menelakung kemampuan kreativitas peserta didik dan pedagoginya cenderung bersifat naratif dan indoktrinatif. Pada bagian lain, Tilaar dan Nugroho menyorot persoalan mutu pendidikan dari perspektif moral Pancasila. Dengan menekankan kepada aspek keadilan, ditegaskannya bahwa nilai-nilai moral Pancasila bertumpu pada konsep kemakmuran untuk seluruh rakyat yang salah satunya melalui pendidikan yang bermutu (Tilaar, 2008: 174).

Yang pasti bahwa depan, dalam kerangka mewujudkan Indonesia yang maju, cerdas, berbudaya, dan mencapai masyarakat madani (*civil society*) memasuki tataran perbatasan masyarakat dunia, perlu disiapkan kerangka pendidikan nasional yang dapat menjawab tantangan zaman. Terlebih lagi dalam konteks desentralistik pengelolaan pendidikan, sangat diperlukan konsep pengelolaan mutu pendidikan dan model sinergi yang tepat untuk meretas jalan menuju mutu pendidikan. Permasalahan yang akan diungkap dalam tulisan ini adalah "bagaimana wujud mutu pendidikan nasional diungkap dari sisi konsep mutu dan implementasinya dalam dunia pendidikan?"

## MUTU PENDIDIKAN

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada *proses* dan *hasil pendidikan*. Proses pendidikan merupakan interaksi dari input maupun konteks, seperti; bahan ajar (*kognitif, afektif, atau psikomotorik*), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif).

Demikian pula manajemen sekolah dan pengelolaan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau memsinergikan semua komponen dalam wujud interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum dan UN). Namun secara luas prestasi sekolah juga meliputi kondisi yang *intangible* seperti suasana disiplin, keaktifan, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya (yang ini sering terlupakan).

### 1. Pengertian Mutu

Mutu secara konseptual biasanya mengacu kepada empat tokoh besar mutu yakni William Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby ketiganya dari Amerika Serikat dan Kaoru Ishikawa (Jepang). (Deming: <http://www.miftou.com/edwards-deming.html>) diantaranya menekankan pada konsistensi tujuan dan peningkatan sistem produksi dan layanan secara terus menerus, sementara Crosby mengungkapkan bahwa mutu, *consistency of performance to requirement*" (adanya kesesuaian dengan yang dipersyaratkan) (Crosby:1979:17).

Sedangkan Edward Sallis (dalam Juran, 1979:2) mengemukakan konsep mutu dalam tiga pengertian yaitu:

#### a. Mutu sebagai konsep yang absolut (mutlak)

Dalam pengertian ini, mutu dianggap sesuatu yang ideal, seolah esensi dari kebaikan, keindahan, kebenaran, "tiada tanding", "tiada banding", atau "tiada ada duanya. Segalanya lebih dari yang lain. Dalam dunia pendidikan tidak semua (hanya sedikit) orang mampu mengenyam pendidikan sejenis ini, dan hanya beberapa institusi yang mampu menyelenggarakan pendidikan itu dalam kriteria ini. Jadi benar-benar bernuansa elitis. Dalam pembicaraan sehari-hari banyak orang berbicara mutu pendidikan, dengan referensi dan persepsi yang mengacu pada pengertian absolut ini. Kualitas dalam pengertian absolut dapat menjadi sesuatu yang relatif dan bersifat dinamis juga, kalau suatu ketika muncul lembaga lain yang dipersepsi masyarakat sebagai yang terbaik, dengan standar tertinggi.

#### b. Mutu dalam konsep yang relatif

Mutu dalam pengertian ini bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan (standar). Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, standar bersifat dinamis dan ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang berkompeten. Kata standar di sini dapat pula merujuk pada pengertian relatif tentang spesifikasi/karakteristik yang ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan.

Konsep mutu dalam pengertian relatif (standar) ini dipraktekkan oleh "TQM", sebagai pendekatan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan melakukan upaya mencapai standar yang ditetapkan sejak dari input, proses, sampai hasilnya. Sebenarnya dalam konsep kualitas ini ada dua aspek. *Pertama* mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Pemenuhan standar ini ditunjukkan oleh produsen secara konsisten sehingga hasilnya (produk maupun jasa) tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Upaya menjaga kualitas secara konsisten berdasarkan sistem yang dianut dan dimiliki oleh lembaga produsen tersebut biasa disebut "penjaminan mutu" atau "*quality assurance*". Kedua, konsep ini juga mengakomodasikan keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar (persyaratan, kriteria dan spesifikasi) produk dan atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan, dan perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan konsumen/pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen.

### c. Mutu menurut definisi konsumen

Ada pertanyaan, siapakah yang memutuskan apakah suatu institusi pendidikan (sekolah, universitas) menyediakan layanan jasa pendidikan yang bermutu atau tidak. Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada nilai-nilai yang mewarnai jasa pendidikan yang diwujudkan, apakah dari internal sekolah atau tuntutan-tuntutan masyarakat yang menghendaki karakteristik layanan pendidikan tertentu. Nilai-nilai yang dianut sekolah dan aspirasi masyarakat tidak terlalu indentik (sama).

Suatu ketika dapat terjadi suatu produk atau jasa yang dianggap sudah sangat baik dengan berbagai pertimbangan pakar, ternyata kurang disukai konsumen atau bahkan ditolak atau tidak diminati. Organisasi atau lembaga-lembaga (termasuk sekolah) yang mengikuti konsep "*Total Quality Management*" atau TQM beranggapan bahwa "kualitas ditentukan oleh konsumen".

Bagi lembaga pendidikan yang produknya berupa jasa, kepuasan pelanggan dapat bermakna ganda. *Pertama*, kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan di dalam proses pendidikan, dalam bentuk berbagai layanan kepada siswa, baik di dalam kelas, maupun di luar kelas, serta berbagai variasi program yang disajikan yang menyenangkan dan menggairahkan untuk belajar dan beraktivitas. Juga layanan terhadap orang tua di dalam berhubungan dan berkomunikasi serta kerja sama dengan sekolah. *Kedua*, kepuasan terhadap hasil pendidikan yang mengacu pada berbagai kompetensi yang dicapai siswa, baik selama dalam proses (sebagian-sebagian) maupun setelah lulus (kompetensi lulusan/

keseluruhan) berdasarkan standar yang ditetapkan, atau pemenuhan harapan konsumen setelah lulus (terhadap lulusan).

Kepuasan pelanggan, ada yang mengkaitkan dengan "selera" yang dari waktu ke waktu dapat berubah. Oleh karena kepuasan pelanggan berkaitan dengan nilai, aspirasi dan persepsi terhadap sesuatu, maka kata tersebut kuranglah tepat digunakan disini. Tuntutan konsumen atau kualitas tentu bersifat dinamis sesuai kebutuhan, nilai-nilai, aspirasi sebagai refleksi perkembangan masyarakat yang dinamis pula. Meskipun disebut kepuasan, mereka juga tidak sembarangan menuntut harapan asal saja, mereka membandingkan antara berbagai produk dan jasa sejenis. Oleh karena itu, lembaga/institusi penyedia jasa harus selalu mengantisipasi dan merespon tuntutan yang telah berubah dan berkembang tersebut. Sungguhpun demikian, kadar pengakomodasian keinginan masyarakat, seperti telah dibicarakan sebelumnya, harus mengingat keseluruhan fungsi sekolah, antara lain fungsi sosialisasi atau pembudayaan yang justru harus melakukan transformasi (perubahan) bagi masyarakat.

## 2. Implikasi Konsep Mutu dalam Pendidikan

*Pertama*, setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu memahami betul visi atau wawasan tentang mutu pendidikan, sehingga dengan jelas dapat mengarahkan ke mana dan bagaimana satuan pendidikan yang dikelola akan diarahkan. Bagaimana satuan pendidikan (sekolah/madrasah) dengan kesadaran, memposisikan dirinya di dalam upaya peningkatan mutu jauh lebih penting daripada berbagai arahan yang dipaksakan dari luar atau dari atas.

*Kedua*, konsep mutu dalam pengertian standar yang benar-benar teliti sulit diterapkan dalam pendidikan, apalagi konsep ini semula diterapkan di dunia bisnis terutama berkaitan dengan produksi barang. Konsep standar yang berarti penerapan sistem kualitas harus dapat menjaga konsistensi mutu produksi agaknya secara metodologis sulit diterapkan di dunia pendidikan. Ada kesulitan menstandarkan (apalagi menerapkan secara konsisten) "input-proses dan output" pendidikan, meskipun ada yang berupaya kearah itu, semisal menyeleksi calon siswa.

Masalah mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Terdapat para ahli yang mendefinisikan mutu pendidikan secara sederhana yaitu target khusus dari tujuan-tujuan pendidikan (Adams, 2002:1). Tetapi di pihak lain terdapat pandangan yang melihat mutu pendidikan secara lebih komprehensif. Adams menulisnya sebagai berikut.

*"More comprehensive views are also found, and interpretation of quality may be based on an institution's or program's reputation, the extent to which schooling has influenced change in student knowledge, attitudes, values, and behavior, or a complete theory or ideology of acquisition and application of learning"*.

Mencermati pandangan yang demikian luas tampak bahwa kajian terhadap masalah mutu pendidikan akan sangat terkait dengan begitu banyak variabel dan sangat multidimensional.

Adams (2002) menyebut dua dimensi penting yaitu *demographic and economic contextual influences*. Julian R. Betts (1999) melalui kaji petik terhadap Hanushek, Kain and Rivkin 1998, Rizzuto and Wachtel 1980, Card and Krueger 1992 menekankan dimensi ekonomi dalam arti bahwa ukuran terhadap mutu pendidikan harus dapat diukur tidak hanya dilihat dari efektivitas proses pendidikan dan mutu guru, tetapi juga sejauh mana hasil pendidikan itu memberikan dampak ekonomi baik dalam bentuk pekerjaan maupun pendapatan yang diperoleh lulusan.

Dalam perspektif global, David Chapman dan Carol A Carrier (1990) melihat dimensi teknologi dalam arti intervensi teknologi terhadap proses pendidikan. Dalam hubungan ini, indikator yang dilihat adalah kemampuan mendaya gunakan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan baik proses maupun hasil pendidikan itu sendiri.

Dalam perspektif yang lebih spesifik, Achmad Sanusi (1994) menyebut tiga dimensi mutu pendidikan khusus mutu hasil belajar yaitu (1) dimensi mutu mengajar yang sangat terkait dengan faktor-faktor kemampuan dan profesionalitas guru, sehingga kajian terhadap mutu pendidikan akan berarti harus mengkaji masalah mutu guru dan mutu proses pendidikan, (2) dimensi bahan ajar yang berbicara masalah kurikulum dalam arti sejauh mana kurikulum suatu institusi pendidikan relevan dengan kebutuhan anak di masyarakat dan kebutuhan lingkungan pendidikan yang berubah demikian cepat, (3) dimensi hasil belajar. Dimensi yang terakhir ini mencakup baik perolehan nilai-nilai hasil belajar maupun dalam cakupan yang luas yaitu perolehan lapangan pekerjaan dan sekaligus perolehan pendapatan setiap lulusan.

Kesulitannya ialah akan muncul berbagai interpretasi mengenai indikator dan kebermaknaan pendidikan yang bermutu. Adams (2002:1) mencoba merumuskan dimensi-dimensi mutu pendidikan dengan menulis sebagai berikut:

*"Education quality apparently my refer to inputs (numbers of teachers, amount of teacher training, number of textbooks), processes (amount of direct instructional time, extent of active learning), outputs (test scores, graduation rates), and outcomes (performance in subsequent employment)"*

Pemikiran yang dikemukakan oleh Adams menunjukkan sejumlah variabel strategis yang mempengaruhi mutu pendidikan, dan sekaligus dimensi-dimensi mutu pendidikan itu sendiri. Yang ingin ditunjukkannya adalah bahwa membahas mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai mutu guru, mutu proses instruksional, mutu fasilitas yang tersedia, mutu hasil belajar, dan bahkan *"performace indicators"* lulusan ketika bekerja. Mengenai mutu guru,

Adams (2002: 27-29) mengemukakan sejumlah faktor seperti *“teacher status, recruitment and deployment, preservice, in-service, and continuing training, incentives for teacher roles and teacher quality”*. Disamping faktor guru, Adams (2002: 30-31) ternyata menempatkan kurikulum sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu proses instruksional, dan mutu hasil belajar serta kinerja lulusan. Mereka mengemukakan sejumlah faktor kurikulum (1) *curriculum not well developed*, (2) *teacher do not accept or do not receive the curriculum*, (3) *too much to learn*, and (4) *poor alignment of textbooks with curriculum*.

## REALITAS VERSUS IDEALITAS

Ketika kita ingin mengungkap persoalan mutu pendidikan, fokus kita biasanya selalu bertumpu pada dua isu pokok yaitu kondisi real dan wacana idealitas, dua hal yang memang sering berjarak. Disparitas antara idealitas dan realitas ini adalah tantangan umum dunia pendidikan nasional. Seberapa jauh arak antara dua kutub tersebut sangat bervariasi antara daerah. Sebagai gambaran umum berikut ini disajikan data global mengenai keadaan guru secara nasional.

### 1. Kondisi Guru menurut Kualifikasi Pendidikan

Data Depdiknas 2004 menunjukkan bahwa dengan merujuk kepada standar kualifikasi tenaga pendidik depdiknas, maka:

- terdapat 24,937 guru yang tidak memenuhi syarat mengajar di TK dan 841,081 guru yang tidak memenuhi syarat mengajar di SD.
- guru SMP yang tidak layak mengajar adalah 122,170 guru pada SMP Umum dan 1,143 guru pada SMP Kejuruan.
- guru SMA yang tidak layak mengajar adalah 27,153 guru pada SMA.
- guru SMK yang tidak layak mengajar adalah 10,728 guru pada SMK.

### 2. Kondisi Guru menurut Kompetensi

Hasil uji kompetensi (kognitif/profesional) oleh Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, direktorat Tenaga Kependidikan pada tahun 2004 dapat diketahui bahwa para guru kurang menguasai substansi materi untuk semua mata pelajaran. Rerata tingkat penguasaan substansi materi tersebut adalah:

- Untuk tingkat SD dengan sampel 39,723 diperoleh hasil: (1) Bahasa Indonesia 38,01%; (2) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 36,78%; (3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 46,18%; (4) Matematika 34,28%; (5) non bidang studi 40,16%.
- Untuk tingkat SMP dengan sampel 2,250 diperoleh hasil : (1) Bahasa Inggris 51,54%; (2) Biologi 40,85%; (3) Matematika 34,04%; (4) Fisika 57,18%; (5) Bahasa Indonesia 25,16%; (6) Kewarganegaraan 38,74%; (7) Sejarah 52,02%; (8) Ekonomi 35,58%; (9) Geografi 50,22%; (10) Non Bidang Studi 40,22%.

Fakta di atas menunjukkan bahwa betapa dua kutub realitas dan idealitas dalam kerangka mutu pendidikan menunjukkan kesenjangan yang fundamental. Itu baru dari aspek guru. Fakta ini secara mutlak menggambarkan betapa kita masih mengalami kesulitan memenuhi standar mutu terutama dari perspektif konsumen. Dua dimensi yang dikemukakan secara teoritis di atas yaitu mutu dalam proses layanan pendidikan, dan mutu capaian atau hasil-hasil pendidikan yang mengacu pada berbagai kompetensi yang dicapai siswa, jelas mengalami distorsi pada konteks realitas. Karenanya, kita sulit sekali berharap pemenuhan standar kelulusan, katakan ujian nasional misalnya, manakala dari aspek proses layanan pendidikan tersebut tidak mendapatkan prioritas.

## PEMBAHASAN

Uraian di atas menunjukkan bahwa mempersoalkan falsafah mutu pendidikan harus berangkat dari pembahasan yang mendalam tentang falsafah pendidikan itu sendiri. Wujud sebuah bangsa yang dicitakan dan akan dibangun melalui pendidikan pada dasarnya telah tergambar dengan jelas pada pembukaan UUD 1945. Kegagalan *derivatif* terhadap nilai filosofis yang termuat baik dalam Pancasila maupun dalam Pembukaan UUD 1945 bisa jadi muara dari kemelut pendidikan nasional. Dengan demikian dibutuhkan kajian dan penelusuran filosofis pendidikan sehingga seluruh produk kebijakan pendidikan memiliki koherensi yang ketat dengan nilai-nilai filosofis yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945. Bahkan pada tataran yang lebih praktis mulai dari kurikulum hingga pembelajaran di kelas seyogyanya merefleksikan nilai-nilai filosofis dimaksud.

Komitmen pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui delapan standar nasional pendidikan tentu tidak memadai bila tidak diikuti dengan kerangka normatif dalam pelaksanaannya. Selain itu, komponen-komponen standar tersebut masih perlu kajian yang lebih jauh sehingga tidak mengalami distorsi baik secara konseptual maupun pada tingkat implementasi. Semisal kurikulum yang secara konten masih sangat padat, atau system pembinaan profesional guru yang tidak efektif dan berbagai macam isu diseperti upaya perbaikan mutu pendidikan nasional.

## KESIMPULAN

Polemik dan kritik yang diarahkan kepada dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan nasional pada dasarnya dapat dipandang sebagai sarana untuk lebih mendewasakan pendidikan, sehingga melahirkan kekayaan pengalaman dan terutama spirit dalam upaya pencarian model penyelenggaraan pendidikan nasional. Ujung dari semua itu adalah harapan bersama untuk menjadikan pendidikan nasional sebagai bagian dari aksi cultural maupun transformasi sosial untuk menuju bangsa yang bermartabat sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.[1]